



PERAN POLITIK NASIONAL DALAM STRATEGI NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

THE ROLE OF NATIONAL POLITICS IN NATIONAL STRATEGY AND PUBLIC POLICY FORMATION IN INDONESIA

Aghya Anasita

Program studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum, UNISRI Surakarta

Email: anasitaaghya@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 05-12-2025

Revised : 07-12-2025

Accepted : 09-12-2025

Published : 11-12-2025

Abstract

National politics plays a crucial role as the direction and guideline for state policy, while national strategy serves as a means of implementing that policy in order to realize the nation's ideals as stated in the Preamble to the 1945 Constitution. This paper outlines the meaning of national politics and strategy, their relationship, and their application through the political superstructure and political infrastructure systems, which serve as the main pillars of the Indonesian government. It also discusses how the implementation of national politics and strategy is realized through public policies oriented toward the welfare of the people. National development policies and the national management system are essential tools for achieving national goals through a just, participatory, and sustainable development process. Guided by the values of Pancasila, the 1945 Constitution, the Archipelago Outlook, and National Resilience, national politics and strategy are expected to direct the nation's full potential toward achieving a just, prosperous, and prosperous society. Therefore, the integration of government policy and public participation is key to creating an effective and democratic national political system.

Keywords: *national politics, national strategy, public policy*

Abstrak

Politik nasional memiliki peran penting sebagai arah dan pedoman kebijakan negara, sementara strategi nasional berfungsi sebagai cara untuk melaksanakan politik tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa tertuang di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembahasannya, makalah ini menguraikan pengertian politik dan strategi nasional, hubungan antara keduanya, serta penerapannya melalui sistem *suprastruktur politik* dan *infrastruktur politik* yang menjadi pilar utama dalam mekanisme pemerintahan Indonesia. Selain itu, dibahas pula bagaimana implementasi politik dan strategi nasional diwujudkan melalui kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Politik pembangunan nasional dan sistem *manajemen nasional* menjadi sarana penting dalam mencapai tujuan negara melalui proses pembangunan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, politik dan strategi nasional diharapkan mampu menggarahkan seluruh potensi bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, keterpaduan antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem politik nasional yang efektif dan demokratis.

Kata Kunci: *politik nasional, strategi nasional, kebijakan publik*

PENDAHULUAN

Politik nasional merupakan pedoman utama dalam menentukan arah, kebijakan, serta langkah strategis negara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks Indonesia, politik



dipahami sebagai usaha untuk kepentingan bersama baik di tingkat pusat maupun daerah. Rowland B. F. Pasaribu membagi politik dalam dua pengertian, yakni *politics* sebagai aktivitas untuk kepentingan umum dan *policy* sebagai kebijakan dalam menentukan cara terbaik mencapai cita-cita bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa politik nasional tidak satu satunya yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, namun juga bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mewujudkan kepentingan rakyat sesuai dengan nilai dasar negara (Pasaribu, 2000).

Sejalan dengan itu, strategi nasional berperan sebagai langkah konkret untuk melaksanakan politik nasional. Berasal dari kata *strategia* yang awalnya bermakna seni memenangkan peperangan, konsep strategi berkembang menjadi metode pencapaian tujuan di bidang politik, sosial ekonomi, serta pemerintahan. Strategi nasional merupakan sarana pelaksanaan politik nasional baik jangka pendek, menengah, maupun panjang agar sasaran pembangunan tercapai secara optimal (Pasaribu, 2000).

Penyusunan politik serta strategi nasional berlandas pada Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional yang menjadi pedoman dalam pembentukan arah kebijakan negara. Pancasila memberikan landasan ideologi, UUD 1945 sebagai dasar konstitusi, Wawasan Nusantara memperkuat integrasi wilayah, sementara Ketahanan Nasional menjadi penopang dalam menghadapi dinamika global. Karena itu, politik dan strategi nasional tidak hanya difungsikan sebagai alat pemerintahan, namun juga sebagai pedoman mempertahankan eksistensi dan tujuan negara Indonesia (Pasaribu, 2000).

Dalam pelaksanaannya, politik nasional dijalankan melalui sinergi antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA, sedangkan infrastruktur mencakup partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, hingga kelompok kepentingan. Keduanya berperan dalam menentukan arah dan pelaksanaan kebijakan publik. Pasca reformasi 2004, perubahan mekanisme ketatanegaraan membuat Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga visi dan misi Presiden menjadi dasar penyusunan politik serta strategi nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, arah politik dan strategi nasional kini didasarkan pada visi misi Presiden serta dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan (Pasaribu, 2000).

Studi ini bertujuan guna mengidentifikasi serta menjelaskan konsep politik nasional serta strategi nasional dalam konteks pemerintahan Indonesia, menganalisis keterkaitan keduanya dalam proses perumusan kebijakan publik, serta mengkaji bagaimana implementasi politik serta strategi nasional dijalankan.

METODE

Artikel menerapkan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis konsep politik nasional dan strategi nasional berdasarkan referensi ilmiah, dokumen hukum, serta pemahaman teoritis yang relevan. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan informasi melalui buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, undang- undang, serta sumber literatur lainnya berkaitan dengan topik studi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Politik dan Strategi Nasional

Makna politik dari istilah Yunani *polis* ialah negara atau kesatuan masyarakat yang mengatur dirinya sendiri, serta *taia* yang berarti urusan. Seiring perkembangannya, politik mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan, serta upaya mencapai tujuan bersama. Dalam arti *politics*, politik dipahami sebagai usaha yang ditujukan untuk kepentingan umum, sedangkan dalam arti *policy* politik merujuk pada kebijakan yang dipilih sebagai cara terbaik mencapai cita-cita masyarakat. Dengan demikian, politik tidak hanya mengenai kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan, serta diarahkan untuk menyusun kebijakan publik yang mengatur kehidupan masyarakat (Pasaribu, 2000).

Politik juga berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Pengambilan keputusan politik dilakukan melalui sarana umum atau lembaga formal negara, seperti pemerintah dan parlemen. Keputusan yang dihasilkan harus berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Di sinilah politik menjadi wadah bagi proses kompromi, negosiasi, dan perumusan kebijakan yang mampu menjawab berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan kenegaraan (Pasaribu, 2000). Sementara itu, strategi merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari politik. Istilah *strategia* berasal dari bahasa Yunani yang berarti seni seorang panglima atau *the art of the general*. Merujuk Karl von Clausewitz, strategi yakni pengetahuan terkait cara menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang, sementara itu perang merupakan kelanjutan dari politik. Namun, dalam konteks modern, istilah strategi tidak lagi terbatas pada ranah militer, melainkan juga diterapkan secara luas dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan. Dengan kata lain, strategi adalah cara atau metode yang dirancang untuk mencapai kemenangan atau tujuan tertentu (Pasaribu, 2000).

Dalam penyelenggaraan negara, politik nasional dan strategi nasional merupakan dua unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Politik nasional berfungsi sebagai arah dan kebijakan umum negara dalam mencapai tujuan nasional, sedangkan strategi nasional menjadi langkah operasional untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Politik memberi arah, strategi menjalankan langkah nyata, sehingga keberhasilan implementasi negara bergantung pada sinergi keduanya. Politik dan strategi nasional berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi, Wawasan Nusantara sebagai pedoman visi kebangsaan, serta Ketahanan Nasional sebagai dasar operasional. Jika politik diarahkan untuk kepentingan rakyat dan strategi disusun secara sistematis, keduanya menjadi kekuatan utama untuk mencapai cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945, yakni terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat (Pasaribu, 2000).

Struktur dan Mekanisme Politik Nasional

Struktur politik nasional Indonesia berlandaskan prinsip konstitusional dalam UUD 1945 dan tersusun atas dua sistem utama sebagaimana dijelaskan Rowland B. F. Pasaribu, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. *Suprastruktur politik* merupakan lembaga formal negara yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan politik nasional, sedangkan *infrastruktur politik* mencakup elemen-elemen masyarakat yang berperan dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasi rakyat dalam sistem pemerintahan (Pasaribu, 2000). *Suprastruktur politik*



di Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi menjalankan proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan nasional sesuai dengan wewenangnya masing-masing. MPR berperan sebagai lembaga perwakilan tertinggi rakyat yang menetapkan arah umum negara, DPR berfungsi dalam pembentukan undang-undang, Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, sedangkan MA dan BPK melaksanakan fungsi yudikatif dan pengawasan keuangan negara. Keterpaduan antarlembaga ini mencerminkan sistem politik yang bersifat demokratis dan konstitusional (Pasaribu, 2000)..

Selain suprastruktur politik, terdapat pula infrastruktur politik sebagai wadah nonformal di masyarakat yang mencakup partai politik, ormas, media massa, kelompok kepentingan, serta kelompok oposisi. Infrastruktur ini berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah melalui penyampaian aspirasi, kritik, serta dukungan pada kebijakan yang dibuat. Keberadaannya memungkinkan sistem politik berjalan lebih terbuka dan partisipatif karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses politik (Pasaribu, 2000). Hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur bersifat saling bergantung. Lembaga negara membutuhkan masukan publik, sementara masyarakat menyalurkan pandangannya melalui saluran politik yang sah. Keseimbangan keduanya menentukan stabilitas politik, sehingga apabila salah satu melemah, dapat memicu ketimpangan kekuasaan hingga krisis kepercayaan terhadap pemerintah (Pasaribu, 2000).

Sejak Reformasi 1998, sistem politik nasional Indonesia mengalami perubahan signifikan. Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden merupakan mandataris MPR dan penyelenggaraan politik nasional berpedoman pada GBHN. Setelah amandemen, MPR tidak lagi menetapkan GBHN, dan Presiden dipilih langsung melalui pemilu sehingga arah kebijakan pemerintah didasarkan pada visi dan misi Presiden terpilih. Perubahan ini menandai pergeseran mekanisme politik menuju tatanan yang lebih demokratis dan partisipatif (Pasaribu, 2000). Dalam sistem baru ini, kedaulatan berada di tangan rakyat yang berhak menentukan pemimpin dan wakilnya sebagai perumus kebijakan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan politik pascareformasi menuntut transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya menjadi hak, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkeadilan (Pasaribu, 2000).

Implementasi Politik dan Strategi Nasional Terhadap Kebijakan Publik

Pelaksanaan politik dan strategi nasional merupakan tahap konkret dari penerapan kebijakan yang dirancang untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pandangan Rowland B. F. Pasaribu, politik nasional tidak hanya sebatas perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup upaya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik pembangunan nasional menjadi sarana utama dalam mencapai tujuan tersebut, karena sebagai pedoman seluruh lembaga pemerintahan dalam menyusun arah dan langkah pembangunan yang berkesinambungan (Pasaribu, 2000). Politik pembangunan nasional dirancang sebagai pedoman untuk merealisasikan cita-cita negara, yang tercermin dalam empat tujuan utama: melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bernegara, serta berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian berkelanjutan, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan tersebut merupakan implementasi langsung dari politik nasional



yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan publik di bidang ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, dan pertahanan. Dengan demikian, politik pembangunan nasional menjadi manifestasi nyata dari strategi nasional dalam mencapai kesejahteraan rakyat (Pasaribu, 2000).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional diartikan sebagai proses keberlanjutan meningkatkan kualitas manusia serta masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya alam secara optimal. Rowland menjelaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kelestarian lingkungan. Di sinilah strategi nasional berfungsi sebagai pedoman operasional dalam mengatur langkah-langkah pembangunan, agar setiap kebijakan publik tetap berorientasi pada tujuan nasional dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila (Pasaribu, 2000). Manajemen nasional memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan politik dan strategi nasional. Manajemen nasional diartikan sebagai sistem yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui manajemen nasional, seluruh potensi bangsa dikoordinasikan dan diarahkan agar bekerja secara sinergis untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan sistem ini, kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi Masyarakat (Pasaribu, 2000).

Implementasi politik dan strategi nasional tidak hanya terbatas pada tingkat pusat, tetapi juga diterapkan di tingkat daerah melalui sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Menurut Rowland, pelaksanaan otonomi daerah merupakan bentuk nyata dari desentralisasi politik yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat serta mempercepat pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih responsif pada kebutuhan masyarakat daerah (Pasaribu, 2000). Selain itu, pelaksanaan politik dan strategi nasional harus didukung oleh ketahanan nasional yang tangguh. Ketahanan nasional tidak hanya mencakup aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga ketahanan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan ideologi. Rowland menegaskan bahwa ketahanan nasional menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas negara agar pelaksanaan kebijakan publik dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya ketahanan nasional, strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan lebih stabil, terarah, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa mengorbankan kepentingan nasional (Pasaribu, 2000).

KESIMPULAN

Politik nasional dan strategi nasional merupakan dua unsur yang saling terkait dalam penyelenggaraan negara. Politik nasional menjadi arah kebijakan, sedangkan strategi nasional menjadi langkah pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan bangsa secara efektif. Keduanya didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional sebagai fondasi sistem pemerintahan yang demokratis dan berpihak pada rakyat. Implementasi keduanya tercermin dalam berbagai kehidupan melalui pembangunan nasional yang dilakukan secara terpadu untuk mencapai kesejahteraan umum dan stabilitas negara. Keberhasilan pelaksanaan politik dan strategi nasional bergantung pada keselarasan kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kemampuan bangsa menghadapi tantangan global.



Sebagai upaya memperkuat efektivitas politik dan strategi nasional, pemerintah perlu konsisten menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dalam setiap perumusan kebijakan. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses kebijakan juga penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterwakilan kepentingan publik. Seluruh komponen bangsa perlu menjaga keseimbangan antara suprastruktur dan infrastruktur politik agar pembangunan nasional berjalan berkeadilan, merata, serta berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, P. (1983). *Orbit Geostationer Sebagai Wilayah Kepentingan Nasional Guna Kelangsungan Hidup Indonesia*. Lemhannas, Jakarta.
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kranenburg, P. M. (1957). *Ilmu Negara Umum*. Diterjemahkan oleh Mr. T. K. B. Sabaroedin (Cetakan ke-2). JB. Wolters, Jakarta.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1980). *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*. CV. Sinar Bakti, Jakarta.
- Lemhannas. (1992). *Kewiraan untuk Mahasiswa*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pasaribu, R. B. F. (2000). *Pendidikan Pancasila: Bab 9 Politik dan Strategi Nasional*. Pustaka Setia, Bandung.
- Sekretariat Jenderal MPR. (2004). *Undang-Undang Dasar 1945 dengan Amandemen*. Jakarta.
- Soemarwoto, O. (1992). *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- ST. Munadjat Dasaputro. (1978). *Wawasan Nusantara (dalam Ilmu Politik dan Hukum), Buku I*. Alumni, Bandung.
- ST. Munadjat Dasaputro. (1980). *Wawasan Nusantara (dalam Implementasi & Implikasi Hukumnya), Buku II*. Alumni, Bandung.
- ST. Munadjat Dasaputro. (1982). *Wawasan Nusantara (dalam Hukum Laut Internasional), Buku III & IV*. Alumni, Bandung.
- ST. Munadjat Dasaputro. (1983). *Wawasan Nusantara (dalam Gejolak Teknologi dan Konstitusi Laut & Samudra), Buku V*. Alumni, Bandung.